



RENCANA KERJA TAHUN 2021

**BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 1 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 3 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 4 |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU | 5 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis | 5 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan | 13 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi | 17 |
| 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD | 18 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 24 |
| BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN | 25 |
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional | 25 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Biro Administrasi Pembangunan | 28 |
| 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2021 | 30 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN | 36 |
| 4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi | 36 |
| 4.2 Prioritas Perangkat Daerah | 36 |
| 4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan | 38 |
| BAB V PENUTUP | 40 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|----|
| Tabel 2.1 | Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan sampai dengan Tahun 2020 | 6 |
| Tabel 2.2 | Tabel Pencapaian Tujuan dan Sasaran Biro Administrasi Pembangunan | 14 |
| Tabel 2.3 | Tabel Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Provinsi Jawa Timur | 19 |
| Tabel 2.4 | Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Provinsi Jawa Timur | 24 |
| Tabel 3.1 | Tabel Rumusan Rencana Program Kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021 | 31 |
| Tabel 3.2 | Tabel Rumusan Prakiraan Maju Tahun 2022 | 33 |
| Tabel 4.1 | Tabel Program Kegiatan yang Mendukung Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 | |
| Tabel 4.2 | Tabel Prioritas Perangkat Daerah | 37 |

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 43 AHUN 2020**

**TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2021**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 merupakan rencana kerja tahun ke-2 yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024. Penyusunan Renja Biro Adm. Pembangunan ini adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020. Sehingga dalam pelaksanaan program/ kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan yang telah disusun.

Renja ini akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Biro Administrasi Pembangunan dalam satu tahun anggaran mengenai tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Selanjutnya Renja ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Biro Administrasi Pembangunan.

1.2 Landasan Hukum

Renja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Tahun 2008 Seri E);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa

- Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024
 12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
 13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024;
 14. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Renja dimaksudkan untuk merumuskan rencana kerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Biro Administrasi Pembangunan

b. Tujuan

Penyusunan Renja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 bertujuan sebagai pedoman

pelaksanaan pelayanan dan penyusunan rencana anggaran serta evaluasi program dan kegiatan Biro Administrasi Pembangunan

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat : Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan Renja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Memuat : (1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra; (2) Analisis Kinerja Pelayanan; (3) Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi; (4) Review terhadap Rancangan Awal RKPD; (5) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat : (1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; (2) Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan Biro Administrasi Pembangunan, mengacu pada kesesuaian dengan dokumen RKPD dan dokumen Renstra Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat : Prioritas perangkat daerah yang mendukung Prioritas Provinsi dan Prioritas Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

Memuat : Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja Perangkat Daerah melalui penelusuran terhadap program / kegiatan yang tidak memenuhi target, yang memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sehingga dapat diketahui faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja dari program/kegiatan yang direncanakan. Selain itu dapat diketahui dampak yang timbul terhadap capaian kinerja yang pada akhirnya dapat diambil tindakan / kebijakan untuk mengatasi faktor penyebabnya.

Evaluasi Renja Biro Administrasi Pembangunan tahun 2021 didasarkan pada Renstra Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2019 - 2024 dan merujuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan pencapaian Renstra Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan RENJA dan
Pencapaian RENSTRA Biro Administrasi Pembangunan s/d Tahun 2020
(T-C.29, Sesuai Permendagri 86 Tahun 2017)

| No | Sasaran | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | | | | | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019 - 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (Tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2019 (tahun lalu /n-2) | | | Target program / kegiatan Renja PD tahun 2020 (tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2020 (tahun berjalan/n-1) | | | | | |
|----|---|---|---|----|---|---|---|---|---|--|--|-----------------------|---|---|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | K | K | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | K | Realisasi capaian | Tingkat capaian (%) | | | | |
| | | | | | | | | | | K | K | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10 (5+7+9) | 11= (10/4) | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya kebijakan bidang pembangunan | 1 | 3 | 03 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program Lama) | Indeks kepuasan masyarakat / aparaturnya terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 % | - | - | - | | | | |
| | | | | | | 1 | 3 | 03 | 01 | Program Pelayanan Kesekretariatan (Program Baru) | 1. Nilai evaluasi implementasi SAKIP Biro Administrasi Pembangunan | 82,6 | - | - | - | - | 82 | 82 | 100 |
| | | | | | | | | | | 2. Persentase Indikator Program yang tercapai | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | | | | | 3. Persentase realisasi anggaran | 97 | - | - | - | - | 95 | 95 | 100 | |
| | | | | | | | | | | 4. Indeks Profesionalita | 88 | - | - | - | - | 88 | 88 | 100 | |

| No | Sasaran | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019 - 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (Tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2019 (tahun lalu /n-2) | | | Target program / kegiatan Renja PD tahun 2020 (tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2020 (tahun berjalan/n-1) | | | | |
|----|---------|---|--|---|--|--|------------|-----------------------|---|---|---------------------|----|----|-----|
| | | | | K | K | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | K | Realisasi capaian | Tingkat capaian (%) | | | |
| | | | | K | K | K | K | 8=7/6 | 9 | 10 (5+7+9) | 11= (10/4) | | | |
| 1 | 3 | 03 | 1 | 19 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (kegiatan lama) | Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 % | - | - | - |
| 3 | 3 | 03 | 01 | 008 | Penyusunan Pengelolaan Dokumen Perencanaan, Administrasi Keuangan, Ketatausahaan dan Kepegawaian (kegiatan baru) | Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, ketatausahaan dan kepegawaian | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 100 |
| 1 | 3 | 03 | 2 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (program lama) | Prosentase sarana dan prasarana Aparatur yang layak fungsi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 % | - | - | - |
| 1 | 3 | 03 | 2 | 12 | Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (kegiatan lama) | Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang dibeli | 52 | 30 | 10 | 10 | 100 % | - | - | - |
| 1 | 3 | 03 | 2 | 31 | Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (kegiatan lama) | Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara | 36 | 20 | 6 | 6 | 100 % | - | - | - |
| 1 | 3 | 03 | 7 | | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah (program lama) | Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 % | - | - | - |
| 1 | 3 | 03 | 7 | 1 | Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah (kegiatan lama) | Jumlah konsultasi | 4.100 | 2.000 | 1.100 | 2.271 | 100 % | - | - | - |

| No | Sasaran | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | | | | | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019 - 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (Tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2019 (tahun lalu /n-2) | | | Target program / kegiatan Renja PD tahun 2020 (tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2020 (tahun berjalan/n-1) | |
|---|---------|---|----|----|---|--|---|---|---|--|------------|-----------------------|---|---|---------------------|
| | | | | | | | | K | K | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | K | Realisasi capaian | Tingkat capaian (%) |
| | | | | | | | | K | K | K | K | | K | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10 (5+7+9) | 11= (10/4) | | | | | |
| Meningkatnya kebijakan bidang pembangunan | 1 | 3 | 03 | 7 | 2 | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah (kegiatan lama) | Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan/ pendidikan/pelatihan | 173 | 65 | 44 | 65 | 100 % | - | - | - |
| | 1 | 3 | 03 | 8 | | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah (Program Lama) | Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| | 1 | 3 | 03 | 8 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan (kegiatan lama) | Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun | 32 | 12 | 6 | 6 | 100% | - | - | - |
| | 1 | 3 | 03 | 8 | 2 | Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran (kegiatan lama) | Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun | 32 | 12 | 6 | 6 | 100% | - | - | - |
| | 1 | 3 | 03 | 8 | 3 | Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data (kegiatan lama) | Jumlah update database Perangkat Daerah | 8 | 4 | 2 | 3 | 100 % | - | - | - |
| | 1 | 3 | 03 | 30 | | Program Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (Program Lama) | Persentase pengendalian administrasi pembangunan sesuai ketentuan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 % | - | - | - |
| | 1 | 3 | 03 | 19 | | Program Sinkronisasi Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Bina Konstruksi (Program Baru) | Jumlah rumusan kebijakan | 15 | - | - | - | - | 3 | 3 | 100 |

| No | Sasaran | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | | | | | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019 - 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (Tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2019 (tahun lalu /n-2) | | | Target program / kegiatan Renja PD tahun 2020 (tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2020 (tahun berjalan/n-1) | |
|---|---------|---|----|----|-----|---|--|---|---|--|------------|-----------------------|---|---|---------------------|
| | | | | | | | | K | K | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | K | Realisasi capaian | Tingkat capaian (%) |
| | | | | | | | | K | K | K | K | | K | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10 (5+7+9) | 11= (10/4) | |
| Meningkatnya kebijakan bidang pembangunan | 1 | 3 | 03 | 30 | 1 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (APBD) (Kegiatan lama) | Jumlah PD yang melakukan rekonsiliasi APBD | 369 | 201 | 67 | 72 | 100 % | - | - | - |
| | 1 | 3 | 03 | 19 | 001 | Penyelenggaraan administrasi pembangunan infrastruktur perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya (Kegiatan baru) | Jumlah modul kebijakan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya | 18 | - | - | - | - | 3 | 3 | 2020 |
| | 1 | 3 | 03 | 30 | 2 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (APBN) (kegiatan lama) | Jumlah PD yang melakukan rekonsiliasi APBN | 140 | 84 | 28 | 28 | 100 % | - | - | - |
| | 1 | 3 | 03 | 19 | 002 | Penyelenggaraan administrasi pembangunan infrastruktur sumber daya air (Kegiatan baru) | Jumlah modul kebijakan sumber daya air | 13 | - | - | - | - | 2 | 2 | 100 |
| | 1 | 3 | 03 | 19 | 003 | Penyelenggaraan kebijakan jasa konstruksi (kegiatan baru) | Jumlah modul kebijakan jasa konstruksi | 14 | - | - | - | - | 2 | 2 | 100 |
| | 1 | 3 | 03 | 31 | | Program Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan (Program Lama) | Persentase kebijakan pembangunan yang tersusun sesuai ketentuan dan tepat waktu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 % | - | - | - |

| No | Sasaran | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019 - 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (Tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2019 (tahun lalu /n-2) | | | Target program / kegiatan Renja PD tahun 2020 (tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2020 (tahun berjalan/n-1) | |
|----|---------------|---|---|---|---|--|-----------|-----------------------|---|---|---------------------|
| | | | | K | K | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | K | Realisasi capaian | Tingkat capaian (%) |
| | | | | K | K | K | K | 8=7/6 | 9 | 10 (5+7+9) | 11= (10/4) |
| | | | Program sinkronisasi Infrastruktur Proyek Strategis Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Kebinamrgaan dan Perhubungan (Program Baru) | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 100 |
| | 1 3 03 20 | | Jumlah rumusan kebijakan | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 100 |
| | 1 3 03 31 1 | | Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan secara Elektronik (kegiatan lama) | 20 | 12 | 4 | 4 | 100 % | - | - | - |
| | 1 3 03 20 001 | | Penyelenggaraan administrasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan sinergitas proyek strategis (kegiatan baru) | 25 | - | - | - | - | 3 | 3 | 100 |
| | 1 3 03 31 2 | | Pengendalian dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa, Rencana Umum Pengadaan dan jasa konstruksi (kegiatan lama) | 6 | 2 | 2 | 2 | 100% | - | - | - |
| | 1 3 03 20 002 | | Penyelenggaraan administrasi pembangunna infrastruktur kebinamargaan (kegiatan baru) | 20 | - | - | - | - | 2 | 2 | 100 |
| | 1 3 03 31 3 | | Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Program Strategis (kegiatan lama) | 10 | 4 | 4 | 4 | 100 % | - | - | - |

| No | Sasaran | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | | | | | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019 - 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (Tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2019 (tahun lalu /n-2) | | | Target program / kegiatan Renja PD tahun 2020 (tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2020 (tahun berjalan/n-1) | | |
|----|---|---|---|----|----|-----|--|---|---|--|------------|-----------------------|---|---|---------------------|------------|
| | | | | | | | | K | K | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | K | Realisasi capaian | Tingkat capaian (%) | |
| | | | | | | | | K | K | K | K | | K | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10 (5+7+9) | 11= (10/4) | | | | | | |
| | | 1 | 3 | 03 | 31 | 003 | Penyelenggaraan administrasi pembangunan infrastruktur perhubungan | Jumlah modul kebijakan infrastruktur perhubungan | 20 | - | - | - | - | 2 | 2 | 100 |
| | | 1 | 3 | 03 | 31 | 4 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Publik (kegiatan lama) | Jumlah sarana dan prasarana yang dibeli | 297 | 192 | 100 | 100 | 100% | - | - | - |
| | | 1 | 3 | 03 | 31 | 5 | Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (kegiatan lama) | Jumlah paket yang selesai diproses | 900 | - | 900 | 900 | 100 | - | - | - |
| | | 1 | 3 | 03 | 31 | 6 | Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa (kegiatan lama) | Jumlah peserta Bimtek dan ujian pengadaan barang/jasa | 35 | - | 35 | 35 | 100 | - | - | - |
| | | 1 | 3 | 03 | 31 | 7 | Advokasi Pengadaan Barang/Jasa / Jasa (kegiatan lama) | Jumlah advokasi PBJ | 8 | - | 8 | 8 | 100 | - | - | - |
| | Meningkatnya kebijakan bidang pembangunan | 1 | 3 | 03 | 84 | | Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan (Program Lama) | Persentase tingkat pelayanan administrasi pembangunan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 % | - | - | - |
| | | 1 | 3 | 03 | 21 | | Program Penyusunan Kebijakan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan (Program Baru) | Jumlah rumusan kebijakan | 8 | - | - | - | - | 8 | 8 | 100 |
| | | 1 | 3 | 03 | 84 | 1 | Pembinaan SDM Pengelola Pembangunan di Lingkungan SKPD Prov. Jatim (Kegiatan Lama) | Jumlah peserta ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa | 400 | 160 | 90 | 115 | 100 % | - | - | - |
| | | 1 | 3 | 03 | 84 | 7 | Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov Jatim (Kegiatan Lama) | Jumlah pedoman kerja dan pelaksanaan tugas Pemprov. Jatim | 5 | 4 | 1 | 1 | 100 % | - | - | - |

| No | Sasaran | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | | | | | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019 - 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (Tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2019 (tahun lalu /n-2) | | | Target program / kegiatan Renja PD tahun 2020 (tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2020 (tahun berjalan/n-1) | | |
|----|---------|---|---|----|----|-----|--|---|---|--|-----------|-----------------------|---|---|---------------------|-----|
| | | | | | | | | K | K | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | K | Realisasi capaian | Tingkat capaian (%) | |
| | | | | | | | | K | K | K | K | 8=7/6 | 9 | 10 (5+7+9) | 11= (10/4) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10 (5+7+9) | 11= (10/4) | | | | | | |
| | | 1 | 3 | 03 | 84 | 11 | Penyusunan Standar Satuan Harga (kegiatan lama) | Jumlah rumusan kebijakan SSHBJ dan ASB | 13 | 7 | 2 | 3 | 100 % | - | - | - |
| | | 1 | 3 | 03 | 21 | 001 | Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Standar Satuan Harga (Kegiatan Baru) | Jumlah modul pedoman pelaksanaan pembangunan dan standar satuan harga | 20 | - | - | - | - | 4 | 4 | 100 |
| | | 1 | 3 | 03 | 21 | 002 | Evaluasi dan Pengendalian Realisasi Anggaran (Kegiatan Baru) | Jumlah modul realisasi anggaran APBD dan APBN | 23 | - | - | - | - | 4 | 4 | 100 |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis dan Penyusunan dan Penetapan SPM, pemerintah wajib menyusun SPM berdasarkan urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar, sebagai bagian dari pelayanan publik. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 selanjutnya mengatur tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah.

Analisis kinerja pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur akan diuraikan melalui penjelasan capaian tiap program kinerja yang ada dan pada tahun 2019 kinerja Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur menunjukkan hasil yang baik dalam melaksanakan program dan arah kebijakan organisasi dari 7 program dengan 21 kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2019 dengan total pagu sebesar Rp. 42.306.393.000,- didapatkan realisasi anggaran sebesar Rp. 40.306.393.000,- atau terealisasi 96,02 % yang artinya ada efisiensi dan efektivitas atau sebab lainnya sebesar 3,92 %. Adapun hasil/keluaran kinerja akan diuraikan dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Tujuan dan Sasaran Biro Administrasi Pembangunan
(T-C.30 Sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017)

| Indikator | SPM / Standar Nasional | IKK | Indikator Sasaran | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | | Catatan Analisis | |
|---|------------------------|-----|---|---------------------------------|------|------|------|-------------------|------|----------|------|------|------------------|-----------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2019 | 2021 | 2022 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Meningkatnya kebijakan bidang pembangunan | - | - | Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Terpenuhi |
| | | | Persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Dari Evaluasi dan Pencapaian Renstra maka didapati berbagai permasalahan diantaranya :

1. Koordinasi dengan Perangkat Daerah (PD) terkait dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan dan pengendalian administrasi pembangunan belum optimal dikarenakan beberapa hal, yaitu : (a) Mekanisme koordinasi untuk penyusunan kebijakan pembangunan belum terimplementasikan secara optimal, (b) Mekanisme koordinasi untuk pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan belum terimplementasikan secara optimal, dan (c) Ketersediaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan belum memadai;
2. Penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan administrasi pembangunan belum maksimal dikarenakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk menyempurnakan pedoman pelaksanaan administrasi pembangunan belum efektif;
3. Pengendalian pelaksanaan anggaran belum optimal dikarenakan antara lain: (1) Implementasi kebijakan Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota belum optimal; (2) Monitoring, evaluasi dan pengendalian APBD dan APBN belum optimal, dan (3) Pengembangan sistem pelaporan realisasi APBD dan APBN berbasis elektronik belum optimal
4. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi administrasi pembangunan bidang infrastruktur kebinamargaan, perhubungan, perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya, sumber daya air, jasa konstruksi, proyek strategis dan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha belum optimal
5. Implementasi rancangan pembinaan dan fasilitasi bidang perhubungan dan KPBU kurang optimal dikarenakan kurang intensnya koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang perhubungan dan KPBU belum efektif
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan di bidang Kebinamargaan dan Infrastruktur Proyek Strategis belum optimal.

Dikarenakan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan bidang Kebinamargaan dan Infrastruktur Proyek Strategis berbasis TIK belum optimal;

7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan di bidang perhubungan dan KPBU kurang optimal karena ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemanfaatan TIK pendukung monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan di bidang perhubungan dan KPBU kurang memadai.
8. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi administrasi pembangunan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya belum optimal. Hal tersebut dikarenakan ketersediaan SDM dan dukungan TIK untuk melaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi bidang terkait belum optimal;
9. Implementasi penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan serta fasilitasi kebijakan pembangunan di bidang Sumber Daya Air belum optimal dikarenakan ketersediaan data potensi dan pembangunan sumberdaya air kurang memadai;
10. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi administrasi kebijakan pembangunan di bidang Bina Konstruksi belum optimal karena ketersediaan SDM dan dukungan TIK untuk melaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi bidang terkait belum optimal;
11. Penyiapan bahan untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan implementasi kebijakan pembangunan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya belum optimal karena data dan informasi pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya kurang memadai;
12. Penyiapan bahan untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan implementasi kebijakan pembangunan di bidang Sumber Daya Air belum optimal karena data dan informasi pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang Sumber Daya Air kurang memadai;
13. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan implementasi kebijakan pembangunan di bidang Bina Konstruksi belum

optimal karena data dan informasi pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang Bina Konstruksi kurang memadai;

Dari Permasalahan yang ada dapat diambil beberapa solusi yaitu diantaranya :

1. Meningkatkan Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi implementasinya dalam dokumen perencanaan serta percepatan penyerapan APBD dan APBN
2. Meningkatkan Pembinaan, dan fasiltasi kebijakan pembangunan bidang kebinamargaan, infrastruktur proyek strategis, perhubungan, dan KPBU
3. Meningkatkan Pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi di bidang administrasi pembangunan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Sumber Daya Air, Bina Konstruksi

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Mengacu pada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi Biro Administrasi Pembangunan pada masa yang akan datang, maka isu-isu strategis Biro administrasi pembangunan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas kebijakan dan pengendalian administrasi pembangunan
2. Peningkatan koordinasi untuk mengendalikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur
3. Peningkatan implementasi kebijakan Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota serta monitoring, evaluasi dan pengendalian APBD dan APBN di tingkat Provinsi
4. Optimalisasi pembinaan dan fasilitasi administrasi pembangunan pada bidang Kebinamargaan, Perhubungan, Proyek Strategis, KPBU.
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan di Bidang Kebinamargaan, Perhubungan, Proyek Strategis dan proses Pemilihan kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Badan Usaha (KPBU)
6. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi administrasi pembangunan di Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Bina Konstruksi

7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan di bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Bina Konstruksi
8. Pengembangan sistem informasi monitoring, evaluasi dan pengendalian administrasi pembangunan yang transparan, akuntabel dan aksesibel.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021, menetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Provinsi Jawa Timur

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | Hasil Analisis Kegiatan | | | | | |
|---------------------|---|------------|---|----------------|------------------------|-------------------------|---|------------|--|----------------|------------------------|
| Kode Rekening | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Keluaran | | Pagu Indikatif (Rp) | Kode Rekening | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Keluaran | | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | Tolok Ukur | Target Capaian | | | | | Tolok Ukur | Target Capaian | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.03.01 | Program Pelayanan Kesekretariatan | Sby | Persentaase Indikator Program yang tercapai | 100% | 2.092.687.500 | 3.03.01 | Program Pelayanan Kesekretariatan | Sby | Persentaase Indikator Program yang tercapai | 100% | 9.906.181.214 |
| | | | Persentase realisasi anggaran | 96 % | | | | | Persentase realisasi anggaran | 95 % | |
| | | | Indeks Profesional ASN | 88 | | | | | Indeks Profesional ASN | 88 | |
| | | | Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Biro Administrasi Pembangunan | 82,4 | | | | | Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Biro Administrasi Pembangunan | 82,3 | |
| 3.03.01.01 | Penyusunan Pengelolaan Dokumen Perencanaan Administrasi | Sby | Jumlah dokumen perencanaan, administrasi keuangan, | 30 | 2.092.687.500 | 3.03.01.01 | Penyusunan Pengelolaan Dokumen Perencanaan Administrasi | Sby | Jumlah dokumen perencanaan, administrasi keuangan, ketatausahaan | 30 | 9.906.181.214 |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | Hasil Analisis Kegiatan | | | | | |
|---------------------|---|------------|---|------------------|----------------------|-------------------------|---|------------|---|------------------|----------------------|
| Kode Rekening | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Keluaran | | Pagu Indikatif | Kode Rekening | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Keluaran | | Pagu Indikatif |
| | | | Tolok Ukur | Target Capaian | (Rp) | | | | Tolok Ukur | Target Capaian | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.03.19 | Program Sinkronisasi Infrastruktur bidang sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Bina Konstruksi | Sby | Jumlah Rumusan kebijakan | 3 dokumen | 2.962.079.300 | 3.03.19 | Program Sinkronisasi Infrastruktur bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Jasa Konstruksi | Sby | Rumusan kebijakan | 3 dokumen | 5.629.940.460 |
| 3.03.19.001 | Sinkronisasi Kebijakan dan Kinerja Pembangunan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya | Sby | Jumlah modul kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya | 3 dokumen | 827.639.323 | 3.03.19.001 | Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Infrastruktur Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | Sby | Jumlah modul kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya | 3 Dokumen | 1.876.646.820 |
| 3.03.19.002 | Sinkronisasi kebijakan dan Kinerja Pembangunan Sumber Daya Air | Sby | Jumlah modul kebijakan sumber daya air | 2 dokumen | 1.168.592.186 | 3.03.19.002 | Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air | Sby | Jumlah modul kebijakan sumber daya air | 2 Dokumen | 1.876.646.820 |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | Hasil Analisis Kegiatan | | | | | |
|---------------------|---|------------|--|------------------|------------------------|-------------------------|---|------------|--|------------------|------------------------|
| Kode Rekening | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Keluaran | | Pagu Indikatif (Rp) | Kode Rekening | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Keluaran | | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | Tolok Ukur | Target Capaian | | | | | Tolok Ukur | Target Capaian | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.03.1 9.003 | Sinkronisasi Kebijakan dan Kinerja Bina Konstruksi | Sby | Jumlah modul kebijakan jasa konstruksi | 3 dokumen | 965.847.791 | 3.03.1 9.003 | Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan Jasa Konstruksi | Sby | Jumlah modul kebijakan jasa konstruksi | 2 dokumen | 1.876.646.820 |
| 3.03.20 | Program Sinkronisasi Infrastruktur Proyek Strategis Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU), Kebinamrgaan dan Perhubungan | Sby | Rumusan Kebijakan | 3 dokumen | 4.154.184.000 | 3.03.20 | Program Sinkronisasi Infrastruktur Proyek Strategis, Kerjasama Pemerintah dengan Badan usaha (KPBU) Kebinamrgaan dan Perhubungan | Sby | Jumlah rumusan kebijakan | 2 dokumen | 5.629.940.460 |
| 3.03.2 0.001 | Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Infrastruktur Proyek Strategis dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) | Sby | Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Infrastruktur Proyek Strategis dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) | 4 dokumen | 971.231.096 | 3.03.2 0.001 | Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Infrastruktur Proyek Strategis dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) | Sby | Jumlah modul kebijakan pembangunan proyek strategs dan Kerjasama Dengan Badan Usaha (KPBU) | 3 dokumen | 1.876.646.820 |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | Hasil Analisis Kegiatan | | | | | |
|---------------------|---|--------|---|------------------|----------------------|-------------------------|---|------------|---|------------------|----------------------|
| Kode Rekening | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Keluaran | | Pagu Indikatif | Kode Rekening | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Keluaran | | Pagu Indikatif |
| | | | Tolok Ukur | Target Capaian | (Rp) | | | | Tolok Ukur | Target Capaian | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.03.20.002 | Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Infrastruktur Bidang Kebinamargaan | Sby | Jumlah modul kebijakan infrastruktur kebinamargaan | 3 dokumen | 1.092.354.545 | 3.03.08.002 | Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Infrastruktur Bidang Kebinamargaan | sby | Jumlah modul kebijakan infrastruktur kebinamargaan | 2 dokumen | 1.876.646.820 |
| 3.03.20.003 | Jumlah modul kebijakan infrastruktur perhubungan | Sby | Jumlah modul kebijakan infrastruktur kebinamargaan | 4 dokumen | 2.090.598.359 | 3.03.08.003 | Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Infrastruktur Perhubungan | sby | Jumlah modul kebijakan infrastruktur perhubungan | 4 dokumen | 1.876.646.820 |
| 3.03.20 | Program Penyusunan Kebijakan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan | | Jumlah rumusan kebijakan | 8 dokumen | 3.564.788.500 | 3.03.84 | Program dukungan layanan administrasi pembangunan | sby | Jumlah rumusan kebijakan | 8 dokumen | 3.753.293.640 |
| | Penyusunan Pedman Pelaksanaan Pembangunan Standar Satuan Harga | sby | Jumlah modul pedoman pembangunan dan standar satuan harga | 4 dokumen | 1.623.453.295 | 3.03.84.001 | Penyusunan Pedman Pelaksanaan Pembangunan Standar Satuan Harga | sby | Jumlah modul pedoman pembangunan dan standar satuan harga | 4 dokumen | 1.876.646.820 |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | Hasil Analisis Kegiatan | | | | | |
|---------------------|--|--------|---|----------------|---------------------|-------------------------|--|--------|---|----------------|---------------------|
| Kode Rekening | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Keluaran | | Pagu Indikatif (Rp) | Kode Rekening | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Keluaran | | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | Tolok Ukur | Target Capaian | | | | | Tolok Ukur | Target Capaian | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.03.20.001 | Evaluasi dan Pengendalian realisasi Anggaran | sby | Jumlah modul realisasi anggaran APBD dan APBN | 4 dokumen | 1.941.335.205 | 3.03.30.002 | Evaluasi dan Pengendalian realisasi Anggaran | sby | Jumlah modul realisasi anggaran APBD dan APBN | 4 dokumen | 1.876.646.820 |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program / kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan dari bawah ke atas (*bottom up planning*) berdasarkan asa demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Namun pada Tahun 2020, tidak ada usulan Program dan Kegiatan dari eksternal (masyarakat, LSM, asosiasi dan sebagainya).

Tabel 2.4

**Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2021 Provinsi Jawa Timur**

| No. | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Volume | Catatan |
|------------|---------------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------|
| | NIHIL | | | | |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi dalam Rencana Kerja yang akan dilakukan dalam periode 2021, perlu adanya tinjauan terhadap kebijakan nasional yang berlaku sehingga hasil rumusan dapat mendukung kebijakan nasional tersebut. Rencana kerja daerah disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (RPJPN) yang dijelaskan lebih detail pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam kurun waktu 5 tahunan melalui Peraturan Presiden. Secara umum, visi nasional pembangunan jangka panjang adalah membangun sumber daya manusia yang berkualitas didorong oleh kemajuan perekonomian serta persatuan dan kesatuan yang berlandaskan Pancasila.

Tujuan perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat
- 2) Membuka dan menyerbarluaskan kesempatan kerja
- 3) Meningkatkan lapangan kerja
- 4) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik
- 5) Menumbuhkembangkan daya saing daerah

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021, adalah :

Tema Pembangunan Nasional adalah **Meningkatkan Industri Pariwisata, Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas.**

Sedangkan agenda Pembangunan (Prioritas Nasional)

1. Prioritas Nasional 1 : Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

Arah Kebijakan :

- a. Penguatan pilar pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekonomi;
 - b. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)
 - c. Peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
 - d. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)
 - e. Peningkatan kualitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
 - f. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender
 - g. Peningkatan ketersediaan akses dan kualitas produksi pangan
 - h. Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan
 - i. Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi
2. Prioritas Nasional 2 : Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan

Arah Kebijakan :

- a. Pengembangan wilayah untuk Pulau Papua
- b. Pembangunan wilayah Pulau Maluku
- c. Pembangunan wilayah Pulau Sulawesi
- d. Pembangunan wilayah Pulau Jawa – Bali

- e. Pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara
 - f. Pembangunan wilayah Pulau Kalimantan
3. Prioritas Nasional 3 : SDM berkualitas dan berdaya saing
- Arah Kebijakan :
- a. Meningkatkan produktivitas dan daya saing
 - b. Mengentaskan Kemiskinan
 - c. Meningkatkan kualitas ana, perempuan dan pemuda
 - d. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan
 - e. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial
 - f. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
 - g. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
4. Prioritas Nasional 4 : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- Arah Kebijakan :
- a. Memperkuat moderasi agama
 - b. Meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreatifitas
 - c. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila
 - d. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan
5. Prioritas Nasional 5 : Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
- Arah Kebijakan :
- a. Infrastruktur pelayanan dasar
 - b. Transformasi digital
 - c. Energi dan ketenagalistrikan
 - d. Infrastruktur ekonomi
 - e. Infrastruktur yang mendukung perkotaan
6. Prioritas Nasional 6 : Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim
- Arah Kebijakan :
- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
 - b. Pembangunan rendah karbon
 - c. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim

7. Prioritas Nasional 7 : Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
 - a. Konsolidasi demokrasi
 - b. Menjaga stabilitas keamanan nasional
 - c. Reformasi birokrasi dan tata kelola
 - d. Optimalisasi kebijakan luar negeri
 - e. Penegakan hukum nasional

Berdasarkan arah kebijakan Nasional tahun 2021, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu mengoordinasikan dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan yaitu menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan pembinaan umum di bidang administrasi pembangunan, menyiapkan dan melaksanakan kerjasama Pemerintah Provinsi dengan badan usaha, maka dukungan Biro Administrasi Pembangunan sangatlah penting dalam menyiapkan perumusan kebijakan dalam bidang Pembangunan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Biro Administrasi Pembangunan

Renja Biro Administrasi Pembangunan mengacu Rencana Strategis (Renstra) Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2019-2024, dimana dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Maka tujuan dan sasaran Biro Administrasi Pembangunan itu harus diarahkan pada upaya berkesinambungan pembangunan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan sebagai dasar perumusan dan implementasi kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sumberdaya daerah untuk meningkatkan kemakmuran dengan berlandaskan akhlak mulia.

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai tahun 2021 sebagai penjabaran Renstra Biro Administrasi Pembangunan 2019-2024 dan disesuaikan dengan tupoksi Biro Administrasi Pembangunan dan

menyesuaikan dengan kebijakan pembangunan nasional 2019-2024, adalah sebagai berikut :

Tujuan :

“ Meningkatnya kebijakan bidang pembangunan ”

Sasaran :

1. Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang menjadi kebijakan
2. Persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Tahun 2022

Program dan kegiatan berdasarkan urusan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 berjumlah **4 Program** dengan **9 Kegiatan** dengan Belanja Langsung senilai **Rp. 24.919.355.774,-** (Dua Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh empat) yang seluruhnya bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting |
|----------------|---|--|--------------------|---|---------------------------------|-------------|-----------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.06 | Kesekretariatan Daerah | | | | | | |
| 3.06.01 | Program Pelayanan Sekretariatan | <ul style="list-style-type: none"> • Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Biro Adm. Pembangunan • Persentase Indikator Program yang tercapai • Persentase realisasi Anggaran • Indeks Profesionalitas ASN | Surabaya | <ul style="list-style-type: none"> • 82,3 • 100 • 96 • 88 | 9.906.181.214 | APBD | |
| 3.06.01.001 | Penyusunan, Pengelolaan Dokumen Perencanaan, Administrasi Keuangan, Ketatausahaan, Kepegawaian dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah dokumen perencanaan, administrasi keuangan, ketatausahaan dan kepegawaian | Surabaya | 30 | 9.906.181.214 | APBD | |
| 3.03.21 | Program Penyusunan Kebijakan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan | Jumlah rumusan kebijakan | Jawa Timur | 8 | 3.753.293.640 | APBD | |
| 3.03.21.001 | Kegiatan Evaluasi dan Pengendalian Realisasi Anggaran | Jumlah modul realisasi anggaran APBD dan APBN | Jawa Timur | 4 | 1.876.646.820 | APBD | |
| 3.03.21.002 | Kegiatan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Standar Harga Satuan | Jumlah modul pedoman pelaksanaan pembangunan dan standar satuan harga | Jawa Timur | 4 | 1.876.646.820 | APBD | |
| 3.03.19 | Program Sinkronisasi Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Bina Konstruksi | Jumlah rumusan kebijakan | Jawa Timur | 3 | 5.629.940.460 | APBD | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting |
|----------------|---|--|--------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.03.19.001 | Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | Jumlah modul kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya | Jawa Timur | 3 | 1.876.646.820 | APBD | |
| 3.03.19.002 | Fasilitasi koordinasi pelaksanaan pembangunan sumber daya air | Jumlah modul kebijakan sumber daya air | Jawa Timur | 2 | 1.876.646.820 | APBD | |
| 3.03.19.003 | Penyelenggaraan Kebijakan Jasa Konstruksi | Jumlah modul kebijakan jasa konstruksi | Jawa Timur | 2 | 1.876.646.820 | APBD | |
| 3.03.20 | Program Sinkronisasi Infrastruktur Proyek Strategis, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Kebinamargaan dan Perhubungan | Jumlah rumusan kebijakan | Jawa Timur | 2 | 5.629.940.460 | APBD | |
| 3.03.20.001 | Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Infrastruktur, Proyek Strategis dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) | Jumlah modul kebijakan pembangunan proyek strategis dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) | Jawa Timur | 3 | 1.876.646.820 | APBD | |
| 3.03.20.002 | Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Infrastruktur Bidang Kebinamargaan | Jumlah modul kebijakan infrastruktur kebinamargaan | Jawa Timur | 2 | 1.876.646.820 | APBD | |
| 3.03.20.003 | Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Infrastruktur Perhubungan | Jumlah modul kebijakan infrastruktur perhubungan | Jawa Timur | 3 | 1.876.646.820 | APBD | |
| | | Jumlah BL | | | 24.919.355.774 | | |

Tabel 3.2 Tabel Rumusan Prakiraan Maju Tahun 2022

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting |
|-------------|---|--|-----------------------------------|---|---------------------------------|-------------|-----------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.06 | Kesekretariatan Daerah | | | | | | |
| 3.06.01 | Program Pelayanan Sekretariatan | <ul style="list-style-type: none"> • Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Biro Adm. Pembangunan • Persentase Indikator Program yang tercapai • Persentase realisasi Anggaran • Indeks Profesionalitas ASN | Surabaya | <ul style="list-style-type: none"> • 82,4 • 100 • 97 • 88 | 2.092.687.500 | APBD | |
| 3.06.01.001 | Penyusunan, Pengelolaan Dokumen Perencanaan, Administrasi Keuangan, Ketatausahaan, Kepegawaian dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah dokumen perencanaan, administrasi keuangan, ketatausahaan dan kepegawaian | Surabaya | 30 | 2.092.687.500 | APBD | |
| 3.03.21 | Program Penyusunan Kebijakan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan | Jumlah rumusan kebijakan | Jawa Timur | 9 | 3.564.788.500 | APBD | |
| 3.03.21.001 | Kegiatan Evaluasi dan Pengendalian Realisasi Anggaran | Jumlah modul realisasi anggaran APBD dan APBN | Jawa Timur | 4 | 1.916.120.671 | APBD | |
| 3.03.21.002 | Kegiatan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Standar Harga Satuan | Jumlah modul pedoman pelaksanaan pembangunan dan standar satuan harga | Jawa Timur | 5 | 1.648.667.829 | APBD | |

| | | | | | | | |
|-------------|--|--|------------|---|-----------------------|------|--|
| 3.03.19 | Program Sinkronisasi Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Bina Konstruksi | Jumlah rumusan kebijakan | Jawa Timur | 3 | 3.160.473.600 | APBD | |
| 3.03.19.001 | Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | Jumlah modul kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya | Jawa Timur | 4 | 840.493.737 | APBD | |
| 3.03.19.002 | Fasilitasi koordinasi pelaksanaan pembangunan sumber daya air | Jumlah modul kebijakan sumber daya air | Jawa Timur | 3 | 1.339.131.085 | APBD | |
| 3.03.19.003 | Penyelenggaraan Kebijakan Jasa Konstruksi | Jumlah modul kebijakan jasa konstruksi | Jawa Timur | 3 | 980.848.778 | APBD | |
| 3.03.20 | Program Sinkronisasi Infrastruktur Proyek Strategis, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Kebinamargaan dan Perhubungan | Jumlah rumusan kebijakan | Jawa Timur | 4 | 4.154.183.455 | APBD | |
| 3.03.20.001 | Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Infrastruktur, Proyek Strategis dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) | Jumlah modul kebijakan pembangunan proyek strategis dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) | Jawa Timur | 5 | 971.231.096 | APBD | |
| 3.03.20.002 | Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Infrastruktur Bidang Kebinamargaan | Jumlah modul kebijakan infrastruktur kebinamargaan | Jawa Timur | 4 | 1.092.354.000 | APBD | |
| 3.03.20.003 | Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Infrastruktur Perhubungan | Jumlah modul kebijakan infrastruktur perhubungan | Jawa Timur | 5 | 2.090.598.359 | APBD | |
| | JUMLAH | | | | 12.843.150.742 | | |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2021 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional Tahun 2021 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan yaitu menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan pembinaan umum di bidang administrasi pembangunan, menyiapkan dan melaksanakan kerjasama pemerintah provinsi dengan badan usaha. Dengan begitu, Biro Administrasi Pembangunan menunjang Misi ke – 3 pada RPJMD 2019 – 2024 yaitu : Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris, memperkuat demokrasi kewarganegaraan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan.

4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Provinsi

-

4.2 Prioritas Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian diatas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1 Tabel Prioritas Perangkat Daerah 2021

| Prioritas PD | Nawa Bhakti | Kode Program | Program | Kode Kegiatan | Pagu | Keterangan |
|---|-------------|--------------|-------------|---|----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Meningkatkan Kualitas Kebijakan di Bidang Pembangunan | 100 % | Jawa Timur | 3.03.20 | Program Penyusunan Kebijakan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan | 3.753.293.640 | |
| | | | 3.03.20.001 | Kegiatan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Standar Harga Satuan | 1.876.646.820 | |
| | | | 3.03.20.002 | Kegiatan Evaluasi dan Pengendalian Realisasi Anggaran | 1.876.646.820 | |

| Prioritas PD | Target | Lokasi | Kode Prog/Keg | Program/Kegiatan | Pagu | Keterangan |
|---------------------------------|--------|--------|---------------|---|----------------------|------------|
| Meningkatkan Kualitas Kebijakan | 100 % | Jawa | 3.03.20 | Program Penyusunan Kebijakan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan | 3.753.293.640 | |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|-------------|--|---------------|--|
| di Bidang Pembangunan | | Timur | 3.03.20.001 | Kegiatan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Standar Harga Satuan | 1.876.646.820 | |
| | | | 3.03.20.002 | Kegiatan Evaluasi dan Pengendalian Realisasi Anggaran | 1.876.646.820 | |

4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan

Dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dan rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2021, diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penyiapan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan, Kebinamargaan, Perhubungan, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Sumber Daya Air, Jasa Konstruksi, Proyek Strategis Dan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU);
2. Pelaksanaan Koordinasi Perumusan Dan Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Di Bidang Kebinamargaan, Perhubungan, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Sumber Daya Air Dan Jasa Konstruksi
3. Pelaksanaan Fasilitasi Kebijakan Pembangunan Di Bidang Infrastruktur Kebinamargaan, Perhubungan, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Sumber Daya Air Dan Jasa Konstruksi;
4. Pelaksanaan Fasilitasi Evaluasi Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota
5. Pelaksanaan Fasilitasi Proses Pemilihan KPBU
6. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Pengendalian APBD Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
7. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Kebinamargaan, Perhubungan, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Sumber Daya Air Dan Jasa Konstruksi

Adapun rencana kerja dan pendanaan, indicator kinerja program (outcome) / Kegiatan (output) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Bab 3, Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 (Renja) ditujukan sebagai pedoman pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur untuk tahun anggaran 202020 sehingga diperoleh peningkatan kualitas perencanaan sesuai dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan Setda Jawa Timur Tahun 2019-2024. Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Biro Administrasi Pembangunan pada Tahun 2021, Renja Biro Administrasi Pembangunan ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh seluruh sumber daya manusia yang ada.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil dan memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan *good governance* di lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur, maka sinkronisasi program/kegiatan di dalam Renja ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Biro Administrasi Pembangunan merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini.

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN



SOEKARYO, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620717 199503 1 003